

GAMBARAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN *MAPPING* KEJADIAN PENYAKIT DI PUSKESMAS X KOTA BANJARBARU

Muhammad Azmiyannoor¹, Talitha Nuzul Nyssa², Rayhanaddinoor Rahmah³,
Lenny Indah Cahyani⁴, Dian Rosadi⁵

^{1,2,3,4} Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat,

Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. A. Yani Km. 36, Banjarbaru, 70714

⁵ Departemen Epidemiologi, Program Studi Kesehatan Masyarakat,

Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. A. Yani Km. 36, Banjarbaru, 70714

Email : azmiyannoormuhammad@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan surveilans epidemiologi membutuhkan SDM yang memiliki keahlian dalam perekaman, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Analisis spasial memudahkan penentuan intervensi pencegahan untuk kasus penyakit pada daerah tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran faktor penghambat pelaksanaan *mapping* kejadian penyakit di Puskesmas X Kota Banjarbaru. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap koordinator program surveilans. Hasil dari studi ini terdapat 4 faktor yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan *mapping* yaitu dari faktor kebijakan, metode, sumber daya manusia, dan motivasi. Secara rinci yaitu, tidak adanya kewajiban untuk melakukan analisa spasial, tidak ada kualifikasi keterampilan khusus untuk petugas surveilans, pelatihan yang terlalu singkat dan tanpa pedoman, fasilitas analisis spasial tidak tersedia lengkap, petugas belum memiliki keahlian analisis spasial, keterbatasan waktu akibat padatnya kegiatan petugas, dan sesama petugas tidak ada saling mendukung untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis spasial.

Kata kunci : Surveilans; *Mapping*; Analisis Spasial.

Pendahuluan

Surveilans epidemiologi merupakan metode pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara tersusun dan berkesinambungan serta penyebarluasan informasi pada bagian yang memerlukan untuk dijadikan penilaian dalam menetapkan keputusan dan kebijakan.¹ Surveilans epidemiologi dalam penerapannya mempunyai indikator kerja yang banyak, sehingga memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian khusus dalam melakukannya karena dalam pelaksanaannya memiliki banyak kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.²

Memfaatkan teknologi pada bidang kesehatan akan selalu memiliki perubahan secara dinamis, contohnya adalah

pengembangan suatu sistem informasi kesehatan. Sistem informasi geografis bisa dijadikan alat yang dapat menunjukkan permasalahan dalam bidang kesehatan berdasarkan pada wilayah tertentu.³ Kemampuan sistem informasi geografis dapat memonitor perkembangan penyakit menular maupun tidak yang membutuhkan penanganan cepat dan khusus, mampu memberikan informasi lebih spesifik yang berkaitan dengan masalah kesehatan.⁴

Teknik analisis penyakit berbasis wilayah dengan memakai analisis spasial dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dalam penentuan intervensi pencegahan kasus penyakit pada daerah tertentu. Analisis spasial dimanfaatkan dalam pemetaan, pengamatan

kejadian suatu penyakit, menganalisis lokasi yang rentan, menganalisis faktor-faktor pada lingkungan, dan perilaku masyarakat. Di samping itu dapat juga mengetahui pola penyebaran penyakit dan daerah potensi penularan suatu penyakit.⁵

Pada dasarnya persebaran dan pola suatu penyakit akan sangat mudah diketahui berdasarkan letak geografis, dan komunitas. Pengumpulan data secara manual bisa diganti menggunakan teknologi ataupun digitalisasi yang lebih praktis, akurat, cepat dan lebih hemat biaya. Maka dari itu, pemanfaatan analisis penyakit berbasis wilayah menggunakan analisis spasial masih sangat penting dan diperlukan karena mampu membuat aksesibilitas lebih baik antara paparan dan informasi kesehatan.⁵

Studi terdahulu menunjukkan bahwa terdapat permasalahan sistem informasi di

Metode

Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif melalui proses pendekatan studi kasus yang mempunyai tujuan mendapatkan suatu informasi tentang gambaran faktor penghambat pelaksanaan *mapping* kejadian penyakit di Puskesmas X Kota Banjarbaru. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 20 Oktober sampai tanggal 27 Oktober 2022. Pengumpulan data dilakukan

Hasil

Kebijakan

Dalam wawancara didapatkan informasi tidak ada kewajiban bagi petugas untuk memiliki keahlian dalam analisa spasial. Selain itu, tidak ada juga kewajiban untuk melakukan analisis spasial dari Kepala Puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Hal ini menyebabkan tidak tersedianya peta penyebaran penyakit di puskesmas.

Metode

Petugas surveilans mengatakan bahwa terdapat pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, namun hanya dilakukan selama 2

Puskesmas X Kota Banjarbaru. Pengolahan data dilakukan secara manual karena keahlian petugas surveilans yang masih sangat kurang. Untuk menemukan faktor penyebab permasalahan tersebut, maka dilakukan analisis akar penyebab masalah dengan mengidentifikasi asal-usul masalah yang menggunakan rangkaian langkah-langkah dengan alat terikat untuk menemukan penyebab utama akar penyebab masalah. Analisis faktor penyebab masalah dilakukan berdasarkan model diagram sebab akibat meliputi faktor kebijakan, metode, sumber daya manusia, dan motivasi terhadap pelaksanaan *mapping* kejadian penyakit di Puskesmas X Kota Banjarbaru.⁶ Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang gambaran faktor penghambat pelaksanaan *mapping* kejadian penyakit di Puskesmas X Kota Banjarbaru.

dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*). Subjek penelitian sekaligus informan utama yaitu Koordinator Program Surveilans di Puskesmas X Kota Banjarbaru. Triangulasi data dilakukan pada sumber data dengan melakukan pengecekan pada data sekunder yang tersedia untuk mendukung hasil wawancara.

“Kadada, kadada kebijakan sih, makanya kada digawi. Cuman bagus kalu kalau ada itu, tapi kadada pang kebijakannya, yang penting data ja tiap bulan.” (Informan)

Informan juga menyatakan bahwa tidak ada kualifikasi khusus yang ditentukan oleh Puskesmas terkait petugas surveilans. Tenaga kesehatan yang mengerti tentang penyakit saja yang merupakan syarat menjadi petugas surveilans di puskesmas.

hari. Pelatihan tersebut dianggap kurang karena tidak disertai dengan pedoman yang dapat

dipelajari kembali oleh petugas sehingga *mapping* tidak dilakukan.

“Soalnya kan semalam ada pelatihan lah, tapi pelatihannya kan sehari kah, dua hari. Kadada modul jua, jika ada modul bisa.” (Informan)

Fasilitas yang dimiliki oleh Puskesmas adalah komputer, *laptop*, dan ponsel petugas administrasi. Namun, *laptop* yang ada tidak mendukung untuk melakukan *mapping* dengan aplikasi QGIS. Berdasarkan hasil wawancara diketahui tidak ada alat untuk mencari titik lokasi seperti Garmin GPS di Puskesmas. Alat elektronik tersebut hanya digunakan untuk membuat laporan mengolah data.

“Ohh, laptop ada, komputer ada. cuman surveilans neh pas Covid sempat ai kami bisa beli itu nah, HP gasan admin karena banyak banar. HP-nya sampai hank, HP pribadi... Cuman laptopnya spek kada anu jua pang, di anu mapping kawa jua kah... Kalau di ruangan komputer aja pang ada.” (Informan)

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola program surveilans didapatkan informasi bahwa petugas surveilans belum memiliki keahlian dalam melakukan analisis spasial. Walaupun telah diadakan pelatihan analisis spasial oleh Dinas Kesehatan bagi petugas surveilans, akan tetapi karena keterbatasan waktu yang dimiliki petugas surveilans akibat padatnya kegiatan juga

Pembahasan

Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah konsep yang menjadi dasar untuk melaksanakan sebuah pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷ Hasil wawancara dengan pengelola program surveilans diketahui bahwa tidak ada kewajiban bagi petugas surveilans untuk memiliki keahlian melakukan analisa spasial sehingga tidak dilakukannya pemetaan penyakit di wilayah kerja puskesmas. Pengelola program surveilans juga menyatakan tidak ada kebijakan yang menyatakan data harus dianalisa secara spasial.

membuat mereka tidak sempat untuk mendalami kembali terkait analisa spasial ini.

“Bu izin nanya. Untuk yang mapping tu jadi belum dibuat tu apa karena tugasnya tu belum bisa membuatnya atau keterbatasan waktu Bu?” (Pewawancara)

“Keduanya. Soalnya kan semalam ada pelatihan lah, tapi pelatihannya kan sehari kah yu?” (Informan)

“Nah harusnya kalu, ngarannya banyak gawian nih kada taanyaki lagi kalu, jadinya kada lihai kalu, jadinya males ai bikinnya jadinya, jangan dicontoh.” (Informan)

Motivasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola program surveilans didapatkan informasi bahwa dari sesama petugas tidak ada saling mendukung untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisa spasial. Hal ini dikarenakan tidak ada tuntutan untuk melakukan analisa spasial serta kesibukan kerja yang dimiliki, sehingga petugas surveilans memilih untuk mengerjakan tugas-tugas yang merupakan tuntutan dan kewajiban saja.

“Dari misalkan dinas kesehatan provinsi atau kabupaten tu pang adalah kebijakan kayak harus ngumpul mapping?” (Pewawancara)

“Kadada, kadada kebijakan sih, makanya kada digawi. Cuman bagus kalu kalau ada itu, tapi kadada pang kebijakannya, yang penting data ja tiap bulan” (Informan)

Puskesmas dalam menjalankan tugasnya memiliki 2 kegiatan utama, yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) serta Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Terdapat 2 jenis UKM, yaitu UKM Esensial dan UKM pengembangan. UKM esensial adalah kegiatan kesehatan yang wajib dilakukan oleh puskesmas untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota di bidang kesehatan. Pada kegiatan UKM esensial tidak disebutkan perlu dilakukannya pemetaan penyakit, artinya tidak ada kewajiban bagi petugas surveilans untuk melakukan pemetaan

penyakit.⁸ Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi petugas surveilans untuk melakukan analisa spasial, tetapi pengelola program surveilans menyatakan dengan adanya *mapping*

Metode

Pedoman merupakan suatu hal yang menjadi petunjuk atau pegangan untuk melaksanakan suatu kegiatan.⁷ Pengelola program surveilans menyatakan tidak ada pedoman untuk melakukan analisis spasial. Pedoman yang dimaksud berupa modul dan video *tutorial* melakukan analisis spasial. Modul merupakan media pembelajaran yang tersusun secara sistematis, terarah, dan operasional serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar pengguna dapat belajar mandiri dan mencapai tujuan pembelajaran. Modul pada umumnya digunakan jika terdapat batasan waktu antara pemelajar dan pembelajar, oleh karena itu modul disusun dengan bahasa yang mudah dipahami untuk mempermudah proses pembelajaran.⁹

Hasil penelitian sebelumnya menyatakan modul efektif untuk mengubah hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Hal ini karena mereka dapat memakai modul kapan pun mereka butuh dan terdapat peningkatan semangat belajar siswa dalam belajar mandiri karena sumber pelajaran sudah ada di modul.⁹ Penelitian yang lain juga menyatakan modul merupakan media yang efektif dalam proses pembelajaran. Namun, pembelajaran dengan modul dapat ditambahkan media lain karena kemampuan seseorang dalam memahami pelajaran berbeda.¹⁰ Media penunjang lain yang dapat digunakan adalah media *audiovisual*, yaitu media yang menggunakan banyak alat indra untuk menangkap informasi yang diberikan sehingga mudah dipahami oleh penerima informasi. Penelitian sebelumnya menyatakan adanya peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat antara sebelum dan setelah dilakukan intervensi dengan menggunakan media *audiovisual*.¹¹

Pedoman membantu pelajar agar dapat belajar mandiri di tengah keterbatasan waktu

dapat membantu mereka mengetahui penyebaran penyakit.

“Bagus aja pang mapping-mapping tu, supaya kita kalu di mana tempatnya yang banyak...” (Informan)

belajar. Selain itu juga dapat meningkatkan motivasi pelajar. Oleh karena itu, tidak adanya pedoman pembelajaran dapat menghambat petugas surveilans untuk melakukan analisa spasial. Selain singkatnya waktu pembelajaran dengan pembelajar, tugas petugas surveilans di lapangan yang cukup banyak membuat petugas lupa langkah-langkah pemetaan.

Fasilitas adalah alat pelengkap untuk memudahkan pengguna melakukan aktivitas sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Fasilitas merupakan hal penting yang wajib ada di tempat kerja untuk mendukung pegawai menyelesaikan pekerjaannya dengan maksimal.¹² Suatu instansi yang menyusun sistem kerja dengan baik tidak akan efektif jika tidak didukung dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh pekerja. Penelitian di Kabupaten Bandung Barat menyatakan fasilitas kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Namun, fasilitas yang memadai perlu didukung dengan kualitas pekerja. Jika pegawai tidak paham cara menggunakan fasilitas yang ada maka pekerjaan tidak akan selesai dengan maksimal. Oleh karena itu diperlukan pelatihan untuk pekerja terkait pekerjaan yang dilakukan.¹³

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen yang paling penting dalam sebuah organisasi karena sumber daya manusia berperan dalam menentukan arah dan tujuan organisasi, kemajuan dan keberhasilan organisasi, serta berperan sebagai pelaksana kegiatan manajemen. Kualitas sumber daya manusia pada Puskesmas dapat berpengaruh pada mutu pelayanan yang diberikan. Kualitas sumber daya manusia puskesmas dapat diketahui dari jumlah tenaga kerja, latar belakang pendidikan dan pelatihan,

keterampilan dan keahlian khusus yang dimiliki, masa kerja, beban kerja, serta riwayat jabatan.¹⁴

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia atau petugas surveilans dalam melakukan pemetaan adalah riwayat pelatihan yang telah diikuti. Pelatihan merupakan proses sistematis untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang untuk mencapai hasil karya yang lebih tinggi. Pelatihan merupakan bagian proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan khusus seseorang atau sekelompok. Oleh karena itu, pelatihan dapat menjadi bagian upaya dalam meningkatkan atau menambah pengetahuan dan keterampilan petugas surveilans.¹⁵

Petugas surveilans Puskesmas sebenarnya telah mengikuti pelatihan mengenai pemetaan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, akan tetapi karena keterbatasan waktu yang dimiliki petugas surveilans untuk mendalami keterampilan melakukan analisis spasial sehingga akhirnya mereka belum bisa menguasai analisa spasial.

Motivasi

Motivasi dalam melakukan pekerjaan dapat muncul akibat situasi kerja yang menyenangkan, merasa bangga atas tugas yang dimiliki, serta untuk mengembangkan kemampuan. Hal yang dapat menghambat munculnya motivasi ini berupa tidak ada pengawasan dalam pekerjaan serta tidak ada

Kesimpulan

Diperoleh kesimpulan bahwa faktor penghambat pelaksanaan *mapping* kejadian penyakit berasal dari segi kebijakan, metode, sumber daya manusia, dan motivasi. Faktor tersebut yaitu tidak adanya kewajiban untuk melakukan analisa spasial, tidak ada kualifikasi keterampilan khusus untuk petugas surveilans, pelatihan yang terlalu singkat dan tanpa pedoman, fasilitas analisis spasial tidak tersedia lengkap, petugas belum memiliki keahlian

penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan.¹⁵

Pemberian motivasi oleh Kepala Puskesmas kepada petugas surveilans dapat mendorong petugas untuk menciptakan suatu inovasi dalam bekerja. Motivasi tersebut bertujuan untuk memunculkan perasaan pemenuhan diri, semangat berprestasi, dan pengakuan diri.¹⁶ Meningkatkan motivasi petugas surveilans puskesmas dalam melakukan analisis spasial memerlukan peran kepala puskesmas untuk memberikan penghargaan/kompensasi atas kinerja yang telah dilakukan petugas surveilans. Kompensasi berkaitan dengan prestasi kerja seorang karyawan. Kompensasi merupakan salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap motivasi seseorang, selain faktor eksternal lainnya seperti jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja dalam organisasi tempat seseorang bekerja, serta situasi lingkungan sekitar tempat kerja.¹⁷

Meningkatkan motivasi petugas surveilans memerlukan adanya suatu sistem pemberian insentif selain gaji pokok berdasarkan pencapaian kinerja. Pemberian insentif diharapkan dapat mendorong atau memotivasi petugas untuk memaksimalkan potensi, keterampilan, dan keahliannya untuk mencapai kinerja sesuai target bahkan lebih. Setiap petugas tentu berharap kinerja lebih yang dilakukan dapat dihargai oleh pimpinan/ organisasi dalam bentuk kompensasi (insentif) yang dapat berupa tunjangan, kesempatan melanjutkan pendidikan, serta penghargaan lain sesuai kinerja yang diberikan.¹⁷

analisis spasial, keterbatasan waktu akibat padatnya kegiatan petugas, dan sesama petugas tidak ada saling mendukung untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisa spasial.

Berdasarkan masalah yang ditemukan, disarankan kepada Kepala Puskesmas untuk memberikan pelatihan kepada seluruh petugas surveilans dalam melakukan *mapping* dengan memperhatikan jangka waktu pelaksanaan agar

tidak terlalu singkat. Petugas juga dapat diberikan pedoman cara mengoperasikan *software mapping* agar dapat mempelajarinya kembali. Pemberian *reward* kepada petugas

yang menjalankan tugas dengan baik juga dapat dilakukan agar petugas lebih bersemangat dalam melakukan *mapping*.

Daftar Pustaka

- [1]. Rasmaniar, Mahawati E, Laksmi P, Trisnadewi NW, Unsunnidhal L, Siregar D, et al. Surveilans Kesehatan Masyarakat. Medan: Yayasan Kita Menulis; 2020.
- [2]. Akbar PS, Parinduri SK, Hidana R. Gambaran Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor Tahun 2018. *J Mhs Kesehat Masy* 2019;2:410–21.
<https://doi.org/10.32832/pro.v2i5.2529>.
- [3]. Darnotoa S, Kusnantob H, Sugihartob E. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan dengan Dukungan Sistem Informasi Geografis di Puskesmas Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. *J Kesehat* 2012;5:1–13.
- [4]. Kusuma AP, Sukendra DM. Analisis Spasial Kejadian Demam Berdarah Dengue Berdasarkan Kepadatan Penduduk. *Unnes J Public Heal* 2016;5:48–56.
<https://doi.org/10.15294/ujph.v5i1.9703>.
- [5]. Haidah N, Handini R. Pemetaan Kasus Dbd Berdasarkan Kondisi Lingkungan Di Wilayah Kerja Puskesmas Prambon Nganjuk. *J Sulolipu Media Komun Sivas Akad Dan Masy* 2021;21:349–56.
<https://doi.org/10.32382/sulolipu.v21i2.2320>.
- [6]. Kurniawan P, Budhi MKS. *Smart leadership - Being a decision maker*. Yogyakarta: Penerbit Andi; 2017.
- [7]. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *KBBI Daring n.d.:1*.
- [8]. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2019:1–168.
- [9]. Siang JL, Ibrahim N, Rusmono. Pengembangan Paket Modul cetak Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen SMP Negeri Tidore Kepulauan. *J Teknol Pendidik* 2017;19:191–205.
- [10]. [Muldiyana, Ibrahim N, Muslim S. Pengembangan Modul Cetak Pada Mata Pelajaran Produktif Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 2 Watampone. *J Teknol Pendidik* 2018;20:43–59.
- [11]. Fatimah, Selviana, Widyastutik O, Suwarni L. Efektivitas Media Audiovisual (Video) terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Kelompok Masyarakat Tentang Program G1R1J. *J Kesehat Masy Khatulistiwa* 2019;6:44–51.
- [12]. Kurbani A. Pengaruh Kualitas Layanan Akademik Dan Fasilitas Pendidikan Terhadap Kepuasan Mahasiswa. *J Media Wahana* 2017;13:22–35.
- [13]. Nurhadian AF. Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Bisnis Dan Iptek* 2019;12:1–9.
- [14]. Choriyah S, Anggraini DN. Evaluasi input sistem surveilans penemuan penderita pneumonia balita di puskesmas 2015;4:136–45.
- [15]. Sumardilah DS. Faktor-faktor yang berhubungan dengan hasil pelaksanaan surveilans gizi di puskesmas se Kota Bandar Lampung. *J Kesehat Metro Sai Wawai* 2014;7:22–32.
- [16]. Prasastin OV. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas surveilans epidemiologi penyakit menular tingkat puskesmas di Kabupaten Kebumen tahun 2012. *Unnes J Public Heal* 2013;2:1–10.

[17]. Amaliah R, Leida I, Maidin A. Kinerja petugas pelaksana surveilans kusta di

seluruh puskesmas Kabupaten Jeneponto tahun 2016. J Forum Kesehat 2016:1–7.